

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perdagangan anak di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru dan asing, karena hal tersebut telah lama terjadi. Mengemukanya masalah perdagangan anak tidak lepas dari berkembangnya diskursus mengenai hak asasi manusia. Hal ini disebabkan perdagangan anak dapat menyebabkan seorang anak kehilangan hak-haknya. Hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak diantaranya adalah hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak, dan lain-lain.¹

Bentuk dari perdagangan anak itu bermacam-macam, salah satu bentuknya adalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak. Menurut penelitian *International Programme on Eliminating Child Labour* (IPEC) bahwa sebagian besar anak yang diperdagangkan masuk ke dalam sektor eksploitasi seksual komersial.² Berkaitan dengan masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwanto dkk (2001), bahwa 30% pekerja seks

¹ "31 Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak" dalam [http : // www.sekitarkita.com / more.php?id=294010m2](http://www.sekitarkita.com/more.php?id=294010m2)

² ILO, *Unbearable to the Human Heart : Child Trafficking and Action to Eliminate It*, Geneva, ILO, 1992, xi

komersial di Indonesia adalah anak-anak.³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Indonesia sangatlah tinggi.

Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial tidak dapat dilepaskan dari faktor dalam negeri saja, namun merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal, yang didukung oleh adanya jaringan perdagangan anak. Saat ini perdagangan anak tidak lagi menjadi isu personal suatu negara saja, tetapi juga telah berkembang menjadi isu global. Hal ini tidak lepas dari akibat semakin intensnya perhatian dunia internasional atas masalah perdagangan anak. Selain perdagangan anak yang bersifat lintas batas negara, perdagangan anak di dalam batas negara juga tidak luput dari perhatian negara-negara di dunia dan organisasi internasional.

Kasus perdagangan anak di Batam dapat dikatakan cukup menarik, mengingat daerah tersebut terletak di perbatasan Indonesia. Selain itu Batam memiliki tingkat perekonomian yang tinggi akibat dari adanya kerjasama *Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle* (IMS-GT). Dalam perkembangannya Batam juga telah menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat perdagangan anak yang cukup tinggi. Industri seks di Batam dapat dikatakan cukup luar biasa, mengingat penghasilan sektor prostitusi gelap disana mencapai 3,5 milyar rupiah perhari.⁴

³ Irwanto, et al., *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta, ILO, 2001, hal. 30

⁴ "Rumitnya Memberantas Sindikat Perbudakan Modern", dalam <http://www.liputan6.com/fullnews/76588.html>

Walaupun perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus segera dihapuskan (berdasarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres)), namun belum ada komitmen serius dari pemerintah untuk mengatasinya, hal ini dibuktikan masih lemahnya legislasi. Selain itu belum banyak tulisan yang membahas tentang perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial secara spesifik. Hal ini dikarenakan perdagangan anak seringkali digabungkan dengan perdagangan perempuan, karena terdapat kesamaan dalam struktur dan mekanisme perdagangannya. Oleh karenanya, perlu ada pemisahan diantara keduanya dalam rangka mendapatkan pemahaman yang berpusat pada anak secara komprehensif. Maka berdasarkan argumen diatas, skripsi ini mengambil judul *Dampak Kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) Terhadap Perdagangan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam.*

B. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dapat mendorong perdagangan anak di Batam terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini, aktivitas migrasi berkembang sangat cepat dan batas-batas negara seolah-olah menjadi luluh. Aktivitas perpindahan manusia ini semakin intens dilakukan karena didukung adanya kemajuan transportasi, informasi, dan modal. Aktivitas ini tidak hanya terjadi di dalam batas negara, tetapi juga lintas batas negara. Berkaitan dengan migrasi salah satu macamnya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia merupakan suatu hal yang sifatnya ilegal. Tetapi bukan merupakan migrasi ilegal, dikarenakan dalam perdagangan manusia ada unsur persetujuan yang dilakukan secara sadar.

Salah satu bentuk perdagangan manusia itu adalah perdagangan anak. Anak-anak yang diperdagangkan ini biasanya digunakan untuk prostitusi, pornografi, pembantu rumah tangga, serta pekerjaan eksploitatif lainnya. Selain itu perdagangan anak juga digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Perdagangan anak ini merupakan salah satu aktivitas kriminal internasional. Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setiap tahunnya paling tidak ada 1 juta anak di seluruh dunia yang direkrut masuk ke sektor seks untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.⁵ Masih menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa setiap tahunnya ada sekitar 150 juta orang yang diperdagangkan, dengan jumlah dana yang beredar

⁵ INNLEGG-PATA (*Pacific Asian Tourist Association*), Europa Konferanse 13 Juni 2003

dari aktivitas itu mencapai 7 milyar dolar per tahun.⁶ Dimana mayoritas orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia terutama anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Terutama yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan karena kawasan tersebut terdapat korban dengan jumlah terbanyak. Dimana setiap tahunnya ada sekitar 225.000 korban berasal dari Asia Tenggara dan 150.000 berasal dari Asia Selatan.⁷ Menurut *Coalition Against Trafficking in Women (CATW)*, di Asia setiap tahunnya lebih dari 1 juta anak perempuan yang memasuki pasar seks global.⁸ Hal itu diakibatkan adanya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 sehingga jumlah anak yang dijual dalam industri seks di Asia meningkat. Menurut Adrianus Mooy, sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik dalam sebuah konferensi regional mengenai perdagangan perempuan di Bangkok pada bulan November tahun 1999, menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 telah mengakibatkan meningkatnya jumlah dan anak-anak yang dijual dalam industri seks Asia.⁹

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari masalah perdagangan anak. Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri AS pada tanggal 12 Juni 2000 mengenai

⁶ Editorial : Perdagangan Anak Fenomena Yang Perlu Penanganan Serius, *Jurnal Progressia*, Vol. IV No. 02, Juni 2001, hal. 5

⁷ Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak.* *Ibid*, hal. 9

⁸ "Coalition Against Trafficking in Women", dalam <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/catw/apmap.htm>

⁹ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta, Galang, 2004, hal. 16

Trafficking in Person, Indonesia bersama dengan 22 negara lainnya dipandang sebagai sumber *trafficking*, baik untuk kepentingan dalam negeri ataupun mancanegara.¹⁰ Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan perdagangan anak domestik yang ekstensif, selain menjadi negara pengirim bagi perdagangan anak internasional. Berkaitan dengan masalah itu Indonesia menempati peringkat pertama di Asia.¹¹

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah tujuan perdagangan anak adalah Batam. Selain menjadi tempat tujuan, Batam juga sebagai daerah transit bagi perdagangan anak. Fenomena tersebut tidak lepas dari tingginya pertumbuhan ekonomi Batam, akibat masuknya Batam dalam kerjasama IMS-GT, sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai daerah sasaran sindikat perdagangan anak. Akibatnya sektor industri dan pariwisata semakin berkembang sehingga tingkat perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial juga meningkat. Diperkirakan jumlahnya mencapai 30% dari perkiraan 15 ribu pekerja seks di Batam.¹²

Sehingga masuknya Batam ke dalam kerjasama IMS-GT telah mendorong perkembangan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di daerah tersebut.

¹⁰ Bagong Suyanto, "Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 29, 2003, hal. 52

¹¹ "Tiap Tahunnya 15.000 Anak Perempuan Dijual ke Luar Negeri", dalam <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0309/14/nas3.htm>

¹² "Banyak Anak Menjadi Pekerja Seks di Batam dan Kepri", dalam <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0309/14/nas3.htm>

D. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah :
“Bagaimana kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dapat mendorong perkembangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam ?”

E. Kerangka Pemikiran

Pasca perang dingin terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem dunia. Saat ini dunia tengah dihadapkan pada proses globalisasi, dimana batas-batas negara seolah-olah menjadi luluh. Akibat dari proses tersebut adalah orang-orang menjadi semakin terhubung dan mempengaruhi satu sama lainnya.

Dalam bidang ekonomi, saat ini terdapat kecenderungan adanya integrasi ekonomi yang berbasis kawasan, seperti AFTA, NAFTA, dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Untuk memahami kerjasama IMS-GT digunakan teori integrasi dari Ernst Haas, dimana kerjasama tersebut disebabkan oleh proses integrasi yang diletakkan dalam konteks wilayah (regional). Ernst Haas mendefinisikan integrasi sebagai berikut:¹³

Proses dimana para aktor politik dari berbagai setting bangsa yang berbeda-beda diajak mengarahkan kesetiaan, harapan, dan aktivitas politik ke daerah pusat yang baru dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki dan menuntut pengabsahan atas negara-negara bangsa yang belum ada.

¹³ Martin Griffiths, terj. Mahyudin & Izzamur Makmur, *Lima Puluh Pemikir Hubungan Internasional*, Jakarta, Murai Kencana, 1999, hal. 246

Salah satu bentuk integrasi adalah integrasi ekonomi, dimana saat ini dalam proses tersebut terdapat kecenderungan membentuk regionalisme ekonomi. Regionalisme ekonomi dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam regionalisme ekonomi tersebut, yang secara geografis berada dalam suatu wilayah area dan menjalankan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan posisi mereka dan mengembangkan perekonomian mereka.¹⁴

Berkaitan dengan regionalisme ekonomi tersebut, salah satu macamnya adalah pusat-pusat pertumbuhan, baik formal maupun informal. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa segitiga atau segiempat pertumbuhan. Konsep segitiga pertumbuhan mengacu pada penyatuan secara ekonomi tiga wilayah yang secara geografis berdekatan dan memiliki faktor-faktor produksi yang komplementer. Konsep ini mengacu pada apa yang disebut oleh Lee Tsao Yuan sebagai *Regional Economic Zone's* (REZ's). REZ's merupakan dua atau lebih wilayah yang secara geografi berdekatan dan dipisahkan oleh batas-batas nasional, namun secara ekonomi disatukan melalui arus investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.¹⁵

Kerjasama IMS-GT tersebut dibangun dengan dasar *enlightened self-interest* negara peserta, yang bermula dari adanya kepentingan bersama untuk

¹⁴ Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, New Jersey, Princeton University Press, 1987, hal. 294

¹⁵ Lee Tsao Yuan, *REZ's in The Asia Pasific ; A Conceptual Approach*, Makalah pada Simposium Internasional tentang "Kerjasama Regional dan Segitiga Pertumbuhan di Kawasan Asia Tenggara," National University of Singapore, 23-24 April 1992, hal. 3

keuntungan.¹⁶ Kerjasama ini dimulai dari kerjasama tingkat rendah yang selanjutnya akan *spillover* ke bidang kerjasama yang lain. Keberhasilan kerjasama di bidang ekonomi akan diikuti dengan kerjasama di bidang yang lain, sehingga selanjutnya dapat mengarah ke integrasi. Yang membedakan REZ's dengan *custom union* adalah kedekatan geografis, dimana faktor ini memiliki peran penting dalam melipatgandakan setiap keuntungan geografis, dan memiliki peran penting dalam melipatgandakan setiap keuntungan dalam operasi bisnis. Selain itu, motivasi REZ's adalah untuk meningkatkan ekspor, karena dibentuk untuk mengkombinasikan komplementaritas faktor-faktor produksi dari wilayah yang secara geografis berdekatan untuk mencapai efisiensi produk, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Sementara *custom union* memiliki tujuan untuk membentuk pasar bersama.¹⁷

Berkaitan dengan segitiga pertumbuhan tersebut, menurut Chia dan Lee (1993) terdapat tiga tipe segitiga pertumbuhan, dimana masing-masing dibedakan berdasarkan faktor motivasi. Namun begitu, dalam kenyataannya ketiga tipe tersebut seringkali overlap satu sama lain. Tiga tipe tersebut adalah *Metropolitan spillover into the hinterland*, yaitu kerjasama bersama dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam, serta kesamaan kepentingan geopolitik dan kedekatan wilayah secara geografis.¹⁸ Ciri khas dari tipe pertama adalah adanya daerah yang disebut *core* (metropolitan atau

¹⁶ C.P.F Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, Jakarta, CSIS, 1997, hal. 110

¹⁷ Lee Tsao Yuan, *op.cit.*, hal. 9-13

¹⁸ Ann Duffy, *Growth Triangle of South East Asia*, East Asia Analytical Unit, Australia, 1995, hal. 7

pusat) dan daerah *periphery* (pinggiran). Industri yang ada di daerah pusat kemudian akan *spillover* ke daerah pinggiran untuk meningkatkan daya saingnya. Karena di daerah pinggiran upah buruh dan harga tanah relatif masih murah. Sementara itu dalam tipe yang kedua, kerjasama sub-regional berkembang dari keinginan untuk bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur serta pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan tipe yang ketiga menekankan pada kedekatan geografis serta kesamaan kepentingan di bidang pembangunan ekonomi sehingga dapat mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional yang aktif.

Salah satu segitiga pertumbuhan yang dikatakan berhasil adalah segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT / *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle*).¹⁹ Menurut Kenichi Ohmae, IMS-GT merupakan salah satu zona ekspor khusus yang paling berhasil di wilayah Asia.²⁰ Lebih lanjut lagi Kenichi Ohmae menyebutkan segitiga pertumbuhan ini sebagai negara kawasan, yang memiliki keterikatan utama dalam ekonomi global. Dalam segitiga ini berlaku pula prinsip komplementer, dimana Singapura memiliki keunggulan di bidang modal sementara Johor dan Riau memiliki keunggulan di bidang tenaga kerja dan sumber daya alam.

Ditinjau dari tipenya, mengacu pada tiga tipe segitiga pertumbuhan yang diajukan oleh Chia dan Lee, maka kerjasama IMS-GT cenderung pada

¹⁹ IMS-GT disebut juga segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura-Johor-Riau), *Singapore Growth Triangle* atau *JSR-GT (Johor-Singapore-Riau Growth Triangle)*

²⁰ Kenichi Ohmae, terj. Ruslani, *Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, Yogyakarta, Qalam, 2002, hal. 126

tipe pertama, yaitu *Metropolitan spillover into the hinterland*, karena dalam kerjasama tersebut Singapura menjadi daerah *core*, sementara Malaysia dan Indonesia menjadi daerah *Periphery*.²¹ Untuk meningkatkan daya saingnya, industri di Singapura mendirikan industri di daerah *periphery* untuk mencari tanah dan tenaga kerja yang murah. Dari sini dapat dipahami bahwa prinsip komplementaritas kemudian mendorong terjadinya *spillover*.

Kerjasama IMS-GT selanjutnya berdampak pada berkembangnya Batam, sebuah daerah di Indonesia yang memiliki jarak geografis yang dekat dengan Singapura. Batam mendapatkan efek 'limpahan' dari Singapura. Dimana kerjasama tersebut telah menarik lebih dari 50 perusahaan asing untuk menanamkan modalnya ke Batam. Selain itu IMS-GT juga mendorong berkembangnya sektor industri di Batam. Kerjasama ekonomi dalam kerangka IMS-GT ini kemudian *spillover* ke bidang kerjasama yang lain, seperti kerjasama pariwisata, transportasi, komunikasi, industri dan pertanian.²² Kerjasama di bidang pariwisata terlihat dari pengembangan dan promosi pariwisata, peningkatan hubungan transportasi, dan program paket wisata.²³ Berkembangnya sektor pariwisata di Batam telah menyebabkan daerah ini menjadi daerah tujuan para turis asing, bahkan Batam dan Bintan menjadi daerah terbesar proyek wisata IMS-GT.²⁴

²¹ Ann Duffy, *op. cit.*, hal. 7

²² Anonim, *Pariwisata Indonesia*, 1994, Jakarta : Dirjend Pariwisata, 1995, hal. 27

²³ *Loc. cit.*

²⁴ T.C. Chang, "Tourism in 'Borderless' World : The Singapore Experience", dalam *Asia Pasific Issues*, No. 73, Mei 2004, hal. 3

Kerjasama IMS-GT telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam meningkat secara signifikan. Kontribusi Batam untuk devisa negara pun meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1986 tercatat hanya sekitar US\$ 20,9 juta, tahun 1992 naik menjadi US\$ 564,5 juta. Jumlah ini naik menjadi US\$ 1,388 milyar pada tahun 1994.²⁵ Pertumbuhan ekonomi ini telah menjadikan Batam sebagai daerah tujuan para pencari kerja di Indonesia.

Kerjasama IMS-GT membawa dampak terhadap berkembangnya perusahaan-perusahaan asing di Batam. Perkembangannya perusahaan asing di Batam juga menyebabkan banyaknya ekspatriat-ekspatriat yang bekerja disana. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada arus wisata di Batam. Sebagaimana dengan daerah tujuan wisata lainnya, wisata di Batam juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kegiatan pariwisata merupakan varian dalam pergerakan manusia di luar rutinitasnya, dan mempunyai tujuan untuk mencari kesenangan (*pleasure*). Salah satu kecenderungan baru dalam kegiatan pariwisata adalah adanya pariwisata seks, dimana kegiatan pariwisata ini ditujukan untuk mencari hiburan seks. Hal tersebut mengakibatkan muncul dan berkembangnya pariwisata yang menawarkan pelayanan seks bagi para wisatawannya. Menurut Sousa, dalam hal pariwisata seks, permintaan akan pariwisata seks anak dalam 10 tahun terakhir terus berkembang.²⁶ Hal ini mengakibatkan pariwisata seks anak menjadi daya tarik baru bagi industri pariwisata.

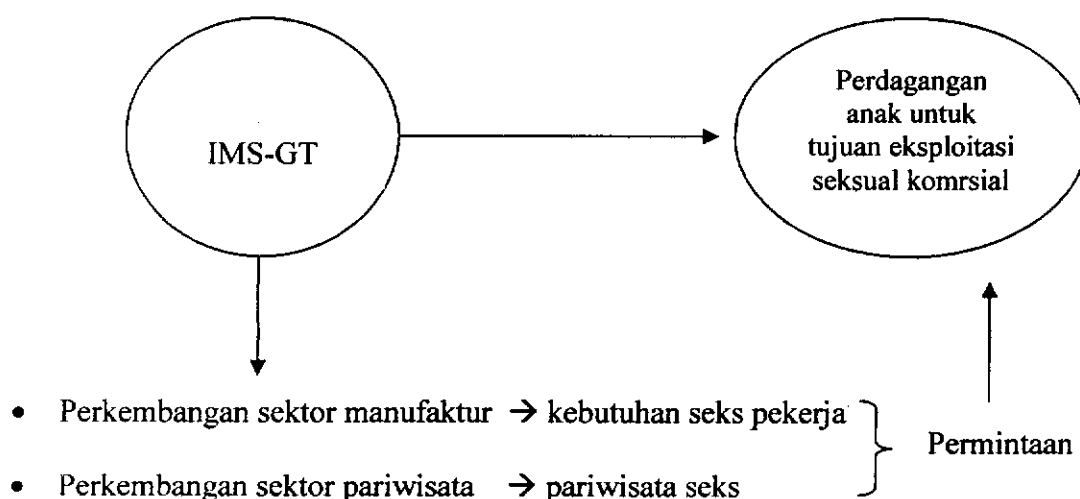
²⁵ Apul D. Maharadja (ed), *Membangun Indonesia : Studi Kasus Batam*" Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 6

²⁶ Koentjoro, *Understanding Prostitution from Rural Communities in Indonesia*, Disertasi, La Trobe University Australia, 1997, hal. 35

Adanya ekspatriat asing dan juga turis asing di Batam telah menyebabkan adanya permintaan akan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Hal ini kemudian menyebabkan berkembangnya perdagangan anak di daerah itu. Secara singkat hubungan antara kerjasama IMS-GT dengan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dapat dipahami dengan bagan berikut ini :

Bagan 1

Hubungan antara Kerjasama IMS-GT dengan
Perdagangan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial



Sementara itu keterkaitan pariwisata dengan tujuan eksploitasi seksual komersial juga dapat dijelaskan dengan teori globalisasi. Menurut Antony Giddens, globalisasi berkaitan dengan transformasi ruang dan waktu, yang tidak hanya berkaitan dengan terciptanya sistem dalam skala besar, namun

juga transformasi konteks pengalaman sosial, baik yang bersifat lokal atau personal.²⁷ Sementara itu, David Held mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses atau seperangkat proses yang terwujud dalam transformasi hubungan dan transaksi sosial.²⁸ Dari definisi tersebut, globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses saling keterhubungan. Suatu kejadian di suatu tempat akan membawa pengaruh bagi masyarakat di tempat lain yang letaknya berjauhan. Selain itu perubahan di tingkat global akan membawa pengaruh pula di tingkat lokalitas.

Pariwisata merupakan salah satu dimensi dari globalisasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan pariwisata tidak bisa lepas dari revolusi teknologi komunikasi dan transportasi yang terjadi dalam proses globalisasi. Pariwisata merupakan salah satu bentuk dari arus pergerakan manusia, dimana arus kegiatan wisata lintas batas negara mulai berkembang sejak akhir Perang Dunia II. Perkembangan tersebut tidak lepas karena adanya dorongan sejumlah faktor, antara lain : semakin majunya teknologi transportasi dan komunikasi, meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya biaya transportasi, dan membaiknya kesehatan dalam masyarakat. Semakin masifnya arus wisatawan kemudian membuat banyak negara mengembangkan industri pariwisatanya.

Adanya pariwisata seks kemudian menyebabkan berkembangnya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Akibat dari hal tersebut, sektor pariwisata menciptakan permintaan terhadap jasa seks anak.

²⁷ Antony Giddens, terj. Imam Khoiri, *Beyond Left and Right : Tarian "Ideologi Alternatif" di atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*, Yogyakarta, Ircisod, hal. 18

²⁸ John Baylis & Steve Smith, *Globalization and World Politics : An Introduction to International Relations*, New York, Oxford University Press, 2001, hal. 15

Dari sini terlihat adanya kaitan antara pariwisata internasional dengan perdagangan anak terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pariwisata telah menciptakan permintaan akan jasa seks anak, sehingga mendorong adanya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.

Dalam konteks Batam, berkembangnya pariwisata seks anak tidak bisa lepas dari perkembangan pariwisata global. Hal itu ditinjau dari segi permintaan. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa telah terjadi tren pariwisata seks anak dalam pariwisata global. Akibatnya tentu saja bahwa Batam telah menjadi target alternatif pariwisata seks anak dan jaringan pedofilia internasional.

Pariwisata sendiri memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan nasional. Menurut *World Tourism Organization* (WTO), sektor pariwisata menjadi sektor dimana negara-negara berkembang selalu mendapatkan keuntungan. Pada tahun 1999 pariwisata internasional menerima 2/3 dari ekspor jasa di negara berkembang dan lebih dari 10% total ekspor.²⁹ Berkaitan dengan masalah tenaga kerja, sektor pariwisata mampu menyerap kurang lebih 3% total tenaga kerja dunia.³⁰ Hal ini dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan sumber potensial bagi negara-negara di dunia, terutama negara berkembang dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya.

²⁹ Bandingkan dengan negara maju, dimana sektor pariwisata hanya menyumbang 1/3 dari ekspor jasa dan 7% dari total ekspor. Lihat pada Lisa Mastny, *Traveling Light : New Paths for International Tourism*, London, Worldwatchpaper 159, 2001, hal 20

³⁰ Anonim, *ILO Training Manual 2 : Combating Child Labour in the Tourism Industry*, Manila, ILO, 2002, hal. 25

Dijadikannya pariwisata sebagai sumber ekonomi suatu negara, tidak lepas dari adanya paradigma pembangunan yang digunakan oleh suatu negara. Industri pariwisata sendiri dapat mengacu pada paradigma pemerataan atau pertumbuhan industri pariwisata dapat menjadi paradigma yang berpusat pada manusia atau produksi. Yang terakhir, pembangunan pariwisata dapat berupa paradigma jangka panjang atau aristokrat.³¹

Paradigma pertumbuhan dan berpusat pada produksi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas. Paradigma aristokrat menekankan pada manfaat yang dinikmati saat ini dan melupakan perspektif jangka panjang. Paradigma-paradigma tersebut biasanya memiliki orientasi yang sempit, karena lebih menekankan pada pencapaian tujuan ekonomi, yaitu memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan peluang kerja, memperbaiki standar hidup dan diversifikasi ekonomi nasional. Sementara itu paradigma yang lain lebih melihat manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan menekankan pada masalah keadilan sosial dan juga memiliki perspektif jangka panjang yang berorientasi pada keadilan.³² Jadi paradigma yang terakhir dapat dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata di Batam dapat dikatakan menganut kedua jenis paradigma tersebut (ekletik). Akan tetapi dualisme paradigma dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dikatakan cukup mustahil, karena

³¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Industri Pariwisata : Suatu Dilema Paradigmatik*, makalah dalam semiloka nasional "Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata", Yogyakarta 26-27, Juni 1998

³² *Ibid*

keduanya saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, ternyata yang lebih berkembang adalah paradigma pertumbuhan. Karena pariwisata ditujukan sebagai sektor penghasil devisa. Hal tersebut tidak lepas dari paradigma pembangunan Batam yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga selalu diarahkan untuk mendapatkan *gross return* setinggi-tingginya.

Pembangunan pariwisata yang berparadigma pertumbuhan di dukung pula oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Kedua lembaga tersebut menjadikan pariwisata sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan ekonomi di negara berkembang.³³ Pada akhirnya pariwisata menjadi sebuah strategi dalam menciptakan pekerjaan sehingga dapat membantu untuk mengatasi kemiskinan.

Sedangkan akibat dari pembangunan pariwisata yang lebih menekankan pada pencapaian *gross return*, adalah tidak diperhatikannya dampak pembangunan terhadap masyarakat serta akibat buruk yang ditimbulkannya. Padahal manusia seharusnya menjadi subyek dalam pembangunan. Hal semacam ini turut menciptakan iklim permisif terhadap adanya pariwisata seks. Meskipun pembangunan pariwisata tidak ditujukan untuk mengorganisasikan sektor industri seks komersial, namun keduanya memiliki kaitan yang erat.

Batam selain menjadi daerah tujuan bagian para wisatawan dan juga daerah tujuan investasi, juga merupakan daerah yang menjanjikan bagi para

³³ Koentjoro, *op.cit.*, hal 32

pencari kerja. Akibatnya banyak pencari kerja yang berdatangan ke daerah ini. Para pencari kerja (khususnya perempuan dan anak), biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Persaingan yang tinggi antar pencari kerja dan juga kebutuhan untuk mencari uang yang banyak menjadikan mereka masuk ke rektor prostitusi. Anak-anak seringkali ditipu oleh sindikat perdagangan anak dengan dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun sebenarnya mereka akan dieksploitasi.

Perdagangan anak terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam dijumpai pula oleh adanya sindikat perdagangan anak yang kemudian membentuk adanya jaringan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Jaringan dalam industri perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial melibatkan pemilik rumah bordil, salon, bar, panti pijat, tempat hiburan, preman, calo, aparat keamanan, anak yang masuk ke dalam eksploitasi seksual komersial (korban) dan pelanggan.

Dalam kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam, peran jaringan perdagangan anak cukup besar. Jaringan tersebut menghubungkan antara permintaan dan penawaran. Hal ini terlihat dari peran jaringan yang dapat mendatangkan anak-anak dari daerah di luar Batam, hingga kemudian mereka masuk dalam industri seks di Batam. Dari sini terlihat bahwa peran jaringan amat penting dalam kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, namun karena sifatnya yang *loosely connected* amat sulit untuk melacaknya dan mendapatkan data yang

akurat. Keberadaan dan mekanisme jaringan tersebut dapat diperoleh dari adanya studi kasus yang didapatkan.

a. Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal.³⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PBB telah memberi batasan mengenai usia anak, namun tetap memberi kebebasan bagi masing-masing negara anggota untuk menentukan batas usia anak. Batasan umur serupa juga diberikan ILO dalam Konvensi ILO No. 182. Sementara itu Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1989, memberi batasan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin (pasal 1:2).³⁵ Sementara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan (pasal 1).³⁶ Berbeda dengan konsep diatas yang lebih mengedepankan batasan umur, Lefidus Malau mendefinisikan anak tidak berdasarkan umurnya melainkan bahwa anak merupakan subjek yang belum lengkap, atau seseorang yang belum mampu untuk berpikir secara

³⁴ "Apakah Definisi Anak Itu ?" , dalam <http://www.sekitarkita.com/okt02/faqanak.htm>

³⁵ Anonim, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*, Jakarta, Sinar Harapan, 2003, hal. 97

³⁶ *Ibid.*, hal. 3

independen atau cukup bertanggungjawab dalam membuat keputusan, dimana ada orang-orang dewasa yang memperhatikan, menjaga dan mengajarnya.³⁷

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ukuran anak tidak terletak pada batasan umur, melainkan pada tingkat kedewasaannya dalam berpikir. Walaupun begitu tidak adanya batasan umur akan sangat menyulitkan dalam mengkaji permasalahan anak serta upaya perlindungan anak. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, baik telah menikah ataupun belum menikah. Sedangkan dalam penelitian ini, anak yang dimaksud hanya terbatas pada anak perempuan saja, karena kebanyakan anak yang diperdagangkan terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial adalah anak perempuan.

b. Perdagangan Anak

Perdagangan anak atau *trafficking child*, berdasarkan *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person*, terutama anak dan perempuan dalam Konvensi PBB menghadapi Organisasi Kriminal Transnasional, didefinisikan sebagai berikut :

"The recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving

³⁷ Ben White & Indrasari Tjandraningsih, *Child Workers in Indonesia*, Bandung, Akatiga, 1998, hal. 15

*of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.*³⁸

Sementara itu menurut *Global Alliance Against Traffic in Women*, sebuah jaringan *Non Governmental Organization* (NGO), mendefinisikan *trafficking* sebagai ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual, reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana seseorang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan hutang pertama kali terjadi.³⁹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak merupakan perpindahan anak dari lingkungan yang familiar dengan anak tersebut, tidak harus melintasi batas internasional dan di dalamnya terdapat unsur eksploitasi. Eksploitasi disini dapat berupa eksploitasi tenaga kerja ataupun eksploitasi seksual. Adanya kesediaan dari anak yang diperdagangkan merupakan suatu hal yang tidak relevan jika terdapat unsur penyalahgunaan, kerentanan posisi, dan ketakutan.

c. Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial

Menurut pertemuan Stockholm, eksploitasi seksual komersial anak didefinisikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan

³⁸ IPEC Working Group on Trafficking, *Trafficking of Children for Labour and Sexual Exploitation : Overview of IPEC's Response to the Problem*, Maret 2001, hal. 2-3

³⁹ Salma Safitri Rahyanan, "Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia Dalam Pengiriman Buruh ke Luar Negeri", *Jurnal Progressia*, dalam *op.cit*, hal. 29

imbalan tunai atau dalam bentuk lain diantara anak itu sendiri, pembeli jasa seks, perantara, agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.⁴⁰ Sedangkan *End Child Prostitution, Child Pornography and Child Trafficking for Sexual Purposes in Asian Tourism* (ECPAT), mendefinisikan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial sebagai pergerakan atau perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah (lokasi) dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif serta memberikan keuntungan bagi para perekrut, *trafficking* dan sindikat kejahatan.⁴¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual yang menempatkan anak dalam kondisi yang eksploitatif. Aktivitas tersebut memberikan keuntungan bagi para agen, perantara, dan pengguna jasa. Dalam perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, terdapat 5 unsur batasan yaitu : perekrutan, perpindahan, eksploitasi, lintas batas, dan *consent*. Berkaitan dengan hal ini dapat dipahami bahwa dalam perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, anak dianggap sebagai objek seks atau barang komersial atau komoditas (memiliki nilai ekonomis) yang dapat memberikan keuntungan.

⁴⁰ Catatan Redaksi, "Perhatian Dunia Terhadap Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak", *Jurnal Hakiki*, dalam *op.cit.*, hal. 3

⁴¹ Ahmad Sofian, "Catatan Penanganan Kasus Perdagangan Anak Untuk Tujuan Pelacuran" *Ibid*, hal 56

Eksplorasi seksual komersial anak meliputi 3 bentuk, yaitu : prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pornografi anak. Eksplorasi seksual komersial anak yang dimaksud disini adalah bentuk yang kedua, yaitu perdagangan anak untuk tujuan seksual, dimana menurut protokol PBB kegiatan ini mengandung 2 elemen, yaitu : rekrutmen, transformasi, transfer, penampungan atau penerimaan anak dengan pembayaran atau keuntungan, dan kedua untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksplorasi seksual lainnya.⁴² Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak untuk tujuan eksplorasi seksual komersial berbeda dengan perekrutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini dikarenakan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksplorasi seksual komersial seringkali ditipu dan kemudian masuk ke sektor eksplorasi seksual komersial anak, ataupun jika mereka secara sadar masuk ke sektor tersebut, mereka menghadapi kondisi yang eksploitatif.

⁴² Catatan Redaksi, "Perhatian Dunia Terhadap Masalah Eksplorasi Seksual Komersial Anak", dalam *Jurnal Hakiki*, No. 6, September 2002, hal. 3

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka berpikir dan data-data yang telah dikemukakan di muka, bahwa hipotesa atau asumsi dasar yang diajukan adalah adanya kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dapat mendorong perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial karena :

- Adanya kerjasama IMS-GT telah menyebabkan berkembangnya sektor industri dan pariwisata. Kedua sektor ini selanjutnya menyebabkan adanya permintaan akan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam. Faktor ini dengan dukungan organisasi kriminal telah mendorong berkembangnya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rentang waktu antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 agar lebih terfokus. Tahun 1990 diambil karena pada saat itu Batam masuk ke dalam integrasi regional dalam kerangka IMS-GT. Masuknya Batam dalam segitiga pertumbuhan tersebut telah memberi akses internasional daerah tersebut, serta membawa dampak yang signifikan di Batam. Sementara tahun 2003 diambil karena pada akhir tahun tersebut Indonesia akan masuk dalam Program Terikat Waktu (TBP / *Time Bound Programme*) Penghapusan Pekerja Anak di sektor terburuk dan tidak menutup kemungkinan menggunakan data dari tahun sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-eksplanatif, yaitu dengan menggambarkan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam, serta menjelaskan faktor-faktor global dan domestik yang terkait dengan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Data-data diperoleh dengan menggunakan metode *Library Research* / studi pustaka, yaitu dengan menggunakan literatur-literatur yang mendukung, baik itu jurnal, buku, ataupun sumber dari internet. Selain itu akan digunakan pula analisa terhadap studi kasus yang didapat

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan awal penulisan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Menjelaskan mengenai gambaran perdagangan anak di Batam, dimana akan dijelaskan gambaran umum Batam dan situasi perdagangan anak di Batam sebelum Batam masuk ke dalam kerjasama IMS-GT.

- Bab III : Menjelaskan mengenai kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan perkembangan industri serta pariwisata di Batam.
- Bab IV : Menjelaskan mengenai dampak kerjasama IMS-GT terhadap perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial di Batam.
- Bab V : Merupakan kesimpulan yang menjadi bagian akhir penulisan